PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU

Mardiah dan Dra. Ernawaty, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Diah_nurain@yahoo.com

ABSTRACT

Much of the food that has been imported into Indonesia without clear information on its packaging. Whether it's because without a marketing authorization and the product is damaged or expired . All of these products are mostly imported illegally from neighboring Malaysia . Often the data information contained in the packaging of food products imported manipulated is to hide the use of materials - hazardous chemicals contained in food in between formalin , borax , and rhodamine -b . Until now , monitoring the implementation of the food and beverage imports in Pekanbaru still felt very minimal . Idealitanya BBPOM protect consumers of imported foods that contain harmful chemicals in Pekanbaru . Knowledge society is still not sufficient to be able to select and use imported products appropriately , correctly and safely . Hence the importance of this issue in this paper the authors take the title Implementation Supervision of Imported Food Products in Pekanbaru . The concept of the theory is that researchers use control . Supervision consists of food standards , assessment measures , and corrective actions . Source of qualitative data obtained , in the form of primary data and secondary data . Determination method used in this study was the informant snowball sampling , while the samples taken are Hall of POM in Pekanbaru especially the supervision and consumer protection . The method of data analysis was done qualitatively obtained by triangulation techniques . In collecting the data , the researcher used interview techniques , observation and documentation . The results showed that the monitoring of imported food products made with two methods , namely Pre Market Surveillance and Monitoring Post Market . Still many food products illegally imported and expired in addition to the factors of government oversight (BBPOM) is not tight . Therefore , the surveillance here BBPOM be very important in assessing the time of registration of the imported food products . Legal protection given to consumers is thus still less than optimal .

Keywords : Monitoring , BBPOM , Food Import

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan dapat tersedia dengan cukup ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli produk makanan tersebut. Salah satu hak konsumen adalah rasa keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian makanan sesungguhnya selain tersedia dalam jumlah yang

cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Oleh karena itu terlebih dahulu makanan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

UU Nomor 7 Tahun 1996 pasal 3 tentang Pangan juga menegaskan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk :

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia menganut Multiple Agency System (system berbagai lembaga) dalam pengorganisasian pengawasan mutu pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga nasional, propinsi, dan daerah/lokal, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. BBPOM Kota Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM adalah lembaga non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut adalah tujuan dari dibentuknya Balai Besar POM ini :

1. Kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap produksi, peredaran dan penggunaan sediaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat.
2. Memperkokoh perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industri makanan yang berbasis pada keunggulan .

Prinsip dasar sistem pengawasan makanan dan minuman, yaitu :

1. Tindakan pengamanan cepat, akurat dan profesional
2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah
3. Lingkup pengawasan menyeluruh, mencakup seluruh proses
4. Berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan kerja internasional
5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum
6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global
7. Memiliki jaringan system informasi keamanan dan mutu produk

Badan POM sampai kini sangat berperan dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman di Kota Pekanbaru. Namun, beberapa tujuan, prinsip dasar system pengawasan dan budaya diatas secara ironis dilapangan kerap kali tidak berjalan. Sampai saat ini, pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman impor di kota Pekanbaru masih dirasakan sangat minim.

Berikut barang yang diawasi peredarannya oleh BPOM Pekanbaru :

1. Barang industri makanan :
 - Produk makanan kaleng
 - Produk minyak makan nabati dan hewani
 - Produk margarin, minyak goreng
 - Pruduk tepung terigu, roti, gula kristal, gula rafinasi
 - Produk mie, macaroni, spaghetti, mihun, soun
 - Produk kecap, tempe, kerupuk
 - Produk bumbu masak/penyedap masakan
2. Industri minuman
 - Produk air mineral
 - Produk es krim, susu, sirup dan olahannya
 - Produk minuman keras, anggur dan jenisnya
 - Produk minuman ringan (softdrink)
 - Produk rokok dan jenisnya

Berdasarkan artikel Tribun Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2012 menyatakan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menemukan lebih dari 10467 kaleng/bungkus makanan dan minuman yang tidak layak edar. Baik itu karena tanpa izin edar dan produk rusak atau kadaluarsa. Kesemua produk tersebut sebagian besar merupakan produk impor ilegal dari negara tetangga Malaysia yang dipasok ke tanah air tanpa ada izin resmi dari pihak berwajib. Adapun beberapa produk impor ilegal tersebut yang paling banyak yakni, minuman cincau merk seasons, minuman Fanta, minuman kaleng milo, serta nescafe. Selain itu aneka pangan lainnya yang dipasok dari negara rumpun melayu tersebut diantaranya, apollo pandan Malyasia, Milo Original Malaysia, Nescafe original Malaysia, Bagus Malaysia dan Milo Malaysia.

Pengawasan makanan impor merupakan pengawasan yang dilaksanakan instansi pengawas untuk melindungi masyarakat dan menjamin agar makanan selama produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan peredaran aman, sehat, layak untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Banyak makanan impor yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan impor biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Seringkali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan impor dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan – bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan di antaranya formalin, borak, dan rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazim disebut fraudulent misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (false statment) dan pernyataan yang menyesatkan (mislead).

Kenyataan-kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen telah dilanggar. Banyak diantara konsumen yang tidak tahu harus melakukan apa ketika mereka menemui kondisi seperti ini. Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, dan relatif mahal turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen dan bagaimana tanggung jawab

pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan hukum. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/ atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, selain itu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat pula perjanjian baku yang merupakan ketentuan baku yang sangat tidak informatif serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 16 bab 65 pasal.

Idealitanya BPOM melindungi konsumen makanan impor yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Pekanbaru. Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk impor secara tepat, benar dan aman. Iklan dan promosi yang sangat gencar telah mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk impor untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Realitanya tanpa partisipasi dari masyarakat baik kelompok maupun perseorangan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, BPOM tidak dapat melakukan tugas pengawasan secara maksimal. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan atau survei terhadap produk-produk impor yang beredar di pasaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah mengenai **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru”**.

Perumusan Masalah

Telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa kegiatan pengawasan terhadap makanan impor di Kota Pekanbaru berjalan tidak efektif. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari lemahnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Berdasarkan gejala tersebut dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru?

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono, 2007:11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat actual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Standar Pangan

Standar pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan mutu pangan, dan standar perdagangan makanan dan minuman yaitu label pangan. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan – ketimpangan dalam upaya meningkatkan standar pangan di masyarakat jika dilihat dari keamanan pangan, kebutuhan gizi, dan standar label pangan dari sebagian besar masyarakat, maka standar pangan belum terpenuhi. Adapun indikasi standar pangan antara lain :

a. Standar Mutu dan Gizi Pangan

Pengawasan mutu dan gizi pangan merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu dan gizi pangan karena hanya produk hasil industri yang bermutu dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah mana, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

b. Standar Keamanan Pangan

Keamanan pangan penting dalam menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Suplai pangan yang aman tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda dengan pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Indonesia telah mempunyai standar nasional yang berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar ini di antaranya memuat bagaimana memproduksi bahan pangan yang benar, bagaimana mengukur cemaran, dan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Indonesia.

c. Standar Label Pangan

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah – kaidah hukum yang menjamin syarat – syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah – kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat – syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label.

Pasal 3 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan setiap label dan iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Adapun produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat, contohnya label tidak dicantumkan.

Tetapi terkadang produk yang beredar luas di masyarakat khususnya pangan tidak mencantumkan label makanan secara lengkap atau memenuhi syarat – syarat yang harusnya berlaku. Tidak hanya produk pangan saja, tetapi produk minuman juga ada yang tidak mencantumkan label padahal label itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam kemasan kemasan suatu produk. Label dikatakan bagian yang sangat penting dalam kemasan suatu

produk karena melalui label konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

Banyak pelaku usaha atau produsen pangan yang menghiraukan syarat – syarat beredarnya suatu produk pangan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan aturan – aturan tentang hal tersebut dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen pangan. Pengawasan yang menyangkut tentang pangan khususnya. Pengawasan yang menyangkut tentang pangan khususnya dalam proses pelabelan atau labelsasi yang dilakukan oleh badan pemerintah yaitu Badan POM.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BBPOM Pekanbaru sendiri membuktikan bahwa masih banyak produk pangan yang beredar di masyarakat kurang memenuhi syarat edar. Seperti masalah label yang dicantumkan tidak lengkap. Misalnya, label yang dicantumkan dalam suatu kemasan suatu produk tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, bahkan tidak ada label izin edar dari BPOM. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari label.

Syarat – syarat yang harus dicantumkan pada label, diantaranya :

- Pada bagian utama label minimal harus memuat : nama produk, berat bersih / isi bersih / netto, nama dan alamat produsen / importir (minimal nama kota, kode pos dan Indonesia atau alamat lengkap) dan nomor pendaftaran.
 - Keterangan pada label minimal memuat : komposisi bahan, golongan BTM (Bahan Tambahan Makanan), nama pemanis, pengawet, pewarna lengkap dengan indeks warna (apabila digunakan), masa kadaluarsa, kode produksi, tanggal produksi keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan perundang – undangan.
2. Melakukan tindakan penilaian
- a. Pemantauan Pengedaran Pangan

Waktu pengawasan oleh petugas Balai Besar POM Pekanbaru dilakukan secara berkala, yang pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap bulan dengan sistem pengawasan represif, yaitu pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk :

1. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat – surat pertanggung jawaban disertai bukti – buktinya mengenai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Koordinasi dalam hal penindakan kasus hukum juga dapat dilakukan BBPOM bersama kepolisian dan kejaksaan. Namun, hal itu harus diawali penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pusat Penyidikan BPOM. Penguatan peran PPNS itu diperlukan untuk menambah daya ungkit penyidikan sehingga menguatkan peran jaksa dalam hal penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan bidang farmasi dan makanan di pengadilan. Banyaknya kasus hukum yang mandek atau ringannya hukuman terdakwa, salah satunya,

disebabkan lemahnya substansi tuntutan yang dilakukan jaksa kepada pelaku. Akibatnya, peningkatan kualitas dan kemampuan personel PPNS BBPOM diharapkan mampu meningkatkan kualitas tuntutan jaksa.

b. Melakukan Pembinaan

Pemerintah menegaskan proses sosialisasi dan pengawasan dalam pemakaian bahan – bahan tambahan pada produk makanan diluar yang diizinkan sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan tindakan tegas dan pidana bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Peran pengawasan Balai Besar POM selama ini memang tidak diartikan untuk memata – matai produsen obat dan makanan, tetapi lebih ditujukan sebagai langkah preventif dan pembinaan.

Karena itu, Balai Besar POM perlu meningkatkan perannya, baik kepada produsen maupun konsumen. Pembinaan kepada produsen ditujukan melalui pemberian petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik. Dengan demikian, produsen mampu membuat produk berkualitas dan bermutu tanpa harus menambah dengan zat – zat yang merugikan kesehatan konsumen. Begitu juga, pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaandalan menilai produk – produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan – bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan yang ada.

3. Melakukan tindakan koreksi

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasional standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai suatu sistem untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali kepada standar.

Berikut tindakan koreksi yang dilakukan Balai Besar POM Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru, yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan pengedaran atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggungjawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi.

Pengawasan *pre-market*, yaitu adanya evaluasi mutu, keamanan, dan efektivitas manfaat produk sebelum diizinkan beredar dalam rangka pendaftaran. Terhadap sediaan makanan sebelum diproduksi dan diizinkan untuk beredar di wilayah Indonesia, harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut. Dalam hal ini, hanya produk-produk yang memenuhi kriteria keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut. Dalam hal ini hanya produk-produk yang memenuhi kriteria keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan yang dapat disetujui untuk di produksi dan dipasarkan di Indonesia.

Pengawasan *post-market* ialah dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat/sarana (inspeksi) produk-produk makanan impor, sehingga dapat diketahui bahwa produk makanan impor tersebut terdapat izin edar maupun expired/kadaluarsa. Selain itu juga

dilakukan kegiatan sampling dan pengujian produk beredar, dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum. Pada tahap ini, BPOM melaksanakan kegiatan inspeksi terhadap produk-produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa di pasaran, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten menerapkan cara-cara produksi atau distribusi, sesuai dengan izin yang dimohonkan olehnya sewaktu melakukan pendaftaran produk makanan impor tersebut. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi dan distribusi yang dilakukan.

Dalam hal produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa beredar di masyarakat, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan dimusnahkan oleh BPOM. Selanjutnya BPOM di dalam melakukan penarikan tersebut, maka BPOM mengeluarkan *public warning* (peringatan) yang menyebutkan mengenai produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa. BPOM kemudian memanggil para wartawan agar dapat membantu menyebarkan *public warning* sehingga masyarakat sebagai konsumen mengetahui mengenai hal yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin hak-hak konsumen.

Dikaji dari implementasi pengawasan Balai Besar POM terhadap tugas pengawasan yang seharusnya dilakukan Balai Besar POM terhadap peredaran makanan dan minuman. Perlindungan konsumen dikatakan efektif apabila hak – hak konsumen seperti yang tertera dalam Pasal 4 huruf a dan b UUPK dapat terpenuhi. Hak – hak tersebut adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Realitanya, dengan masih banyaknya produk pangan yang ilegal dan juga produk pangan yang mengandung bahan – bahan yang membahayakan kesehatan konsumen di Kota Pekanbaru, maka aspek perlindungan konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa itu belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan Balai Besar POM sering terlambat memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isu yang merebak atau Balai Besar POM juga sering terlambat dalam melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap produk pangan yang diisukan mengandung bahan yang berbahaya.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus diperketat. Pengawasan *pre market* harus lebih ketat dan lebih tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji makanan oleh Balai Besar POM hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan beredar di Indonesia baik itu produk impor maupun produk domestik agar dapat diketahui manfaat

secara positif maupun negatif dari makanan tersebut terhadap manusia. Pengawasan pre market dirasa lebih penting juga dengan pertimbangan yang dikeluarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.

Namun demikian, pengawasan// *post market* juga perlu ditingkatkan agar pengawasan Balai Besar POM lebih maksimal, karena pemeriksaan terhadap produk makanan dan minuman beredar hanya dilakukan secara periodik maka ada kemungkinan pihak pengusaha melakukan kecurangan pada saat pemeriksaan tidak dilakukan. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Balai Besar POM. Pihak Balai Besar POM hendaknya lebih fokus terhadap masyarakat, misalnya dengan menyampaikan laporan kemajuan suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap, atau mempublikasikan setiap hasil penelitian yang dilakukan Balai Besar POM. *Public warning* Balai Besar POM seharusnya detail mengenai temuan produk yang bermasalah tersebut, sehingga konsumen tidak dibuat bingung atau panik mengenai pihak mana yang bermasalah, apakah yang dari luar/impor atau dari dalam negeri. Balai Besar POM hendaknya juga lebih banyak memberi himbauan kepada masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik. Masyarakat diharapkan berperan serta secara lebih aktif, sebagai kontrol terakhir terhadap pengawasan peredaran produk makanan yang beredar di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor ini tidak hanya BBPOM saja yang berkewajiban melakukannya. Namun juga diperlukan kerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perdagangan dalam hal membuat peraturan tentang barang beredar dan mengawasi peredaran barang tersebut. Selain itu juga diperlukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, untuk mengetahui apakah produk makanan impor tersebut telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari masyarakat itu sendiri sebagai konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maksudnya adalah bahwa masyarakat dalam membeli suatu produk makanan impor harus jeli dan teliti dalam melihat kemasan, sehingga dapat terhindar dari mengkonsumsi produk makanan yang berbahaya terhadap kesehatan.

Masih banyaknya produk-produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa selain karena faktor-faktor dari pengawasan pemerintah (BBPOM) yang tidak ketat, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Masyarakat seakan tidak peduli dengan keadaannya yang sangat lemah. Oleh karena itu, maka disini pengawasan BBPOM menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian saat pendaftaran produk makanan impor tersebut. BBPOM telah banyak memiliki peraturan – peraturan yang berkaitan dengan produk makanan, dimana dalam peraturan – peraturan yang ada tersebut, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu. Namun seperti yang kita ketahui bahwa peredaran produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa hingga saat ini masih banyak beredar bebas.

Dari penelitian yang dilakukan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat dan makanan, bahwa setiap pelaku usaha atau produsen yang melakukan kesalahan atau ternyata melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau pemerintah ditindak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dengan demikian masih kurang optimal. Sebagai bukti masih sering ada pelanggaran yang merugikan konsumen, dan jika merujuk pada kasus – kasus yang sudah terjadi banyak hal yang mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap produk makanan impor sepertinya tidak optimal dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu ada hal – hal yang memungkinkan untuk terjadinya pemalsuan barang dilakukan oleh pihak importir maupun pihak lain yang memanfaatkan kondisi yang telah

tercipta, seperti ; label yang terdapat pada produk berupa stiker yang ditempelkan pada kemasan produk makanan tersebut.

Selain sanksi administratif, dalam Undang-undang pangan juga diatur tentang sanksi pidana. Ancaman pidana diatur dalam beberapa klasifikasi, yaitu :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000, barangsiapa dengan sengaja :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi ;
 - b. Menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan;
 - e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan;
 - f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;
 - g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan;
 - h. Mengganti label kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000, barang siapa yang lalai :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan.

Ancaman pidana atas pelanggaran tersebut, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

3. Dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000, barang siapa :
 - a. Menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangann dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan;
 - b. Mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi panganyang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan;
 - c. Menggunakan iridasi dslsm kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin;
 - d. Menggunakan sesuatu bahan sebagai kemasan pangan yang diedarkan secara bertentanga dengan ketentuan;
 - e. Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya;

- f. Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratoris;
- g. Memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan;
- h. Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa menyantumkan label;
- i. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui dalam, dan atau dengan label dan atau iklan;
- j. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu;
- k. Memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Perundang-undang pangan dan peraturan pelaksanaannya;
- l. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk tiga hal yaitu :

1. Sanksi administrasi
Sanksi ini diatur dalam Pasal 60. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000.
2. Sanksi pidana pokok
Sanksi ini adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda.
3. Sanksi pidana tambahan
Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa :
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman keputusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - f. Pencabutan izin usaha.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

1. Intensitas Pengawasan

Balai Besar POM memang sebagai instansi Pemerintah Non Departemen yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah melalui peraturan – peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Balai

Besar POM. Jumlah staf ataupun pegawai di kantor Balai Besar POM juga sudah ditentukan Pemerintah.

2. Sistem Pengawasan

Pengawasan Balai Besar POM Pekanbaru yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Sistem pengawasan secara berkala dan acak ini tentunya akan berpengaruh pada luas lingkup produk pangan yang dapat diawasi, karena akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan, serta akan adanya produk yang mungkin ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM Pekanbaru.

Kendala – kendala yang dihadapi Balai Besar POM Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan produk makanan impor di Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Kurang dipatuhinya persyaratan – persyaratan produk makanan dan minuman impor oleh pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk makanan dan minuman tersebut. Para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar. Hal ini meragukan bagi BBPOM untuk memberikan izin edar atau tidak. Hal yang patut disayangkan adalah bahwa BBPOM lebih sering memberikan izin beredar kepada produk pangan daripada menolaknya untuk masuk dan beredar di masyarakat. Selain itu juga banyaknya ditemukan produk impor yang beredar di masyarakat yang belum memiliki izin edar (ML), jadi hanya berupa stiker, sehingga sulit diketahui izin edar tersebut asli atau palsu.

Terkait kurang dipenuhinya persyaratan – persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan – peraturan yang ada terkait persyaratan masuk dan beredarnya produk pangan di masyarakat oleh pelaku usaha, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari pada pelaku usaha masih rendah. Pelaku usaha tersebut seharusnya melakukan kewajiban – kewajibannya, yaitu memenuhi persyaratan – persyaratan, misalnya pemenuhan label dan sebagainya. Pelaku usaha diharapkan untuk memperoleh profit, tetapi juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Untuk itu sebenarnya instansi berwenang perlu menindak dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha lainnya.

- b. Masih rendahnya kesadaran huku konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen.

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada kualitas pengawasan oleh BBPOM. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada di Pekanbaru pengaduan tersebut sangat kecil persentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu jauh lebih besar ketimbang yang mengadu atau melapor. Laporan atau pengaduan ini tentu juga berpengaruh terhadap lemahnya aspek pengawasan dari masyarakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengawasan dari Balai Besar POM,

karena tidak jarang pengawasan oleh BBPOM itu baru dilakukan ketika ada laporan – laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke BBPOM. Oleh karena itu, kesadaran hukum konsumen untuk melaporkan atau mengadukan persoalannya ketika mengonsumsi suatu produk ini sangat positif pengaruhnya bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru.

Untuk mengantisipasi kendala – kendala yang ada maka diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peraturan perundangan yang berlaku untuk produk pangan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk pangan terhadap kesehatan pada masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Perlu adanya peningkatan kapabilitas laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Pekanbaru agar cakupan uji produk pangan yang beredar dapat dilaksanakan secara optimal dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana.
4. Memperkuat sistem regulasi pengawasan makanan dan minuman. Disamping itu perlu adanya pemantapan kerjasama lintas sektor dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan makanan dan minuman.
5. Perlunya peningkatan frekuensi pengawasan makanan dan minuman yang dilakukan secara terencana.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berdasarkan indikator – indikator, seperti standar pangan, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi berada kategori “CUKUP BAIK”. Dikarenakan masih terdapatnya produk makanan impor ilegal atau belum mendapatkan izin edar oleh BPOM yang beredar bebas di pasaran, serta masih terdapatnya produk makanan dan minuman yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan impor di Kota Pekanbaru adalah : intensitas pengawasan dan sistem pengawasan berada kategori “KURANG BAIK”. Dikarenakan perlu dilakukan sistem pengawasan makanan dan minuman yang lebih efektif dan efisien, untuk melindungi masyarakat dari produk – produk yang beresiko terhadap kesehatan.

Tabel

Hasil Temuan Makanan Impor Tanpa Izin Edar / Illegal

No.	Temuan	Jumlah Sarana	Jumlah
1.	Dutch Lady Malaysia	1	2

2.	Peanut Cookie Malaysia	1	18
3.	Yam Cookie Malaysia	1	8
4.	Tianjin Preserved Malaysia	1	3
5.	Nescafe Original Malaysia	1	360
6.	F & N Season Cincou Kurang Gula Malaysia	2	8640+610
7.	Apollo Pandan Malaysia	1	180
8.	Fanta Strawberry Malaysia	1	264
9.	Milo Original Malaysia	1	288
10.	Nestle Nestum Original Malaysia	1	11
11.	Sterilized Milk Bear Brand Malaysia	1	320
12.	Nestle Milo Proto Malt Malaysia	1	10
13.	Nestle Milo Go Futher Malaysia	1	2
14.	Milo Fuze 3 in 1 Malaysia	1	7
15.	Quaker Instan Oatmeal Malaysia	1	6
16.	F & N Season Malaysia	1	240
17.	Sotong d/kicap Malaysia	1	10
18.	Gulong	1	1
19.	Gulong Leg With Mushi Chops	1	10
20.	Gulong Stewed Pork Chops	1	10
21.	Hosen Pineapple	1	16
22.	Ligo Whole Kernel Corn	1	8

Sumber : BPOM Pekanbaru, data diolah 7 Januari 2013

DAFTAR PUSTAKA

❖ Buku

Alex. S. Nitisemito, 1982. *“Manajemen Suatu Dasar”*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Ahmad S. Rucky, 2003. *“Jurnal Adm. Publik & Bisnis”*. Pekanbaru

- AZ. Nasution, 1995. “*Konsumendan Hukum*”. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bohori, H, 1992. “*Pengawasan Negara*”. Rajawali Press, Jakarta
- Brantas, 2009. “*Dasar-dasar Manajemen*”. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Darwis, dkk. 2009. “*Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen*”. Pusbangdik, Pekanbaru.
- R. Terry, 1989. “*Prinsip-prinsip Manajemen*”. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Gunawan Widaja, Ahmad Yani, 2000. “*Hukum tentang Perlindungan Konsumen*”, Ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta.
- H. Moh. Isa. 1980. “*Beberapa Bacaan tentang Dasar-dasar Manajemen*”. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depkes RI.
- Indrawan Rully, dkk, 2003. “*Manajemen Koperasi*”. Pekanbaru
- Siagian, S.P, 2005. “*Fungsi-fungsi Manajemen*”. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- S. P. Siagian, 1988. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1986. “*Pengantar Study Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi dan Manajemen*”. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Shidarta, 2000. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sukoco, Badri Munir. 2006. “*Manajemen Adminisrasi Perkantoran Modern*”. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- T. Hani Handoko. 1995. “*Manajemen*”. Edisikedua. Yogyakarta: BPFE.

❖ **Dokumen**

- Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

❖ **Artikel**

- Harian Riau pos, edisi 11 Agustus 2011.
- Artikel Tribun Pekanbaru edisi 15 Agustus 2012